

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki tiga sektor penting dalam perekonomian, yaitu sektor publik, swasta, dan koperasi. Perkembangan dalam sektor publik tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dimana pemerintah merupakan entitas sektor publik yang besar dan dominan. Adapun sektor publik adalah sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Sektor publik umumnya mencakup lembaga pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN). Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Dalam hal tata kelola administrasi pelaporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor utama yang melatar belakangi dikembangkannya suatu sistem informasi yang berbasis komputer.

Seperti yang tercantum dalam Permendagri No 77 Tahun 2020 yang mengacu pada PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam tata kelola administrasi pelaporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) secara terintegrasi. Untuk itu, Dirjen Bangda Kemendagri mengelola dan mengembangkan suatu sistem informasi terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sendiri yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Selain kemajuan zaman dan teknologi yang melatarbelakangi adanya pembangunan sistem informasi ini, ada juga faktor lain yang mendukung

terciptanya sistem informasi yaitu adanya kelemahan dalam pemanfaatan data-data pembangunan. Hal ini didasari pula karena data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Selain itu, data-data tersebut juga tidak diperbaharui secara berkala, sehingga menyebabkan lemahnya koordinasi antara BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dan SKPD. BAPPEDA sebagai instansi yang berfungsi sebagai unit perencanaan pembangunan daerah, mengalami kendala dalam mengumpulkan data untuk kepentingan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPD dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya. Sebelum diterapkannya SIPD, sejak tahun 2014 Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan penggunaan aplikasi SIMDA Keuangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerahnya yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antara 17 pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Selatan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Bank Sumsel Babel (Wulandari, 2014). Namun, sejak ditetapkannya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan menerapkan SIPD dan SIMDA Keuangan secara bersamaan dalam pengelolaan keuangan daerahnya.

Mengevaluasi penerapan SIPD khususnya pada bagian Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menilai sudah seberapa baik dan berhasilnya aplikasi tersebut digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Amanah, 2018) menjelaskan bahwa penggunaan aplikasi SIPD dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang difokuskan kepada pemanfaatan informasi yang dihasilkan berdasarkan pengolahan data yang telah diinput oleh pemerintah daerah, dimana untuk menunjang hal tersebut dibutuhkan faktor kelengkapan, kemutakhiran, keakuratan, dan validitas data menjadi unsur yang penting dalam proses pengumpulan dan penginputan elemen data yang kemudian akan diolah lebih lanjut menghasilkan analisis data

dalam aplikasi SIPD yang telah dibuat oleh pemerintah. (Sudianing, 2019) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa tata kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara berkualitas sangat penting dalam menunjang perencanaan pembangunan di daerah yang berkualitas dan SIPD menjadi bagian *e-government* memiliki fungsi kritis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan pemerintahan yang responsif terhadap persoalan-persoalan daerah, peningkatan partisipasi dan demokrasi inklusif dalam perencanaan daerah, serta dapat mendorong transparansi dan keterbukaan publik di daerah. (Wurara, 2020) menyatakan bahwa SIPD adalah sistem informasi yang bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah ditinjau dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai dengan teori implementasi George C. Edwards.

Dengan ditetapkannya Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah diubah dari penggunaan SIMDA Keuangan menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sendiri telah menetapkan penggunaan SIPD terhitung sejak tanggal 18 Februari 2021, tetapi dalam pelaksanaannya Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan masih menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan SIPD secara bersamaan. Namun, penerapan SIPD ini sendiri masih terbatas hanya sampai pada tahap perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk tahap penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban SIPD tidak dapat digunakan karena berbagai hal termasuk kesiapan sistem itu sendiri yang menyebabkan penerapannya menjadi tidak sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sedangkan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul laporan akhir **“Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan, penulis mengidentifikasi masalah yang ada, yaitu adanya perbedaan antara penerapan SIPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menyebabkan belum optimalnya penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Dari identifikasi masalah tersebut, penulis merumuskan masalah dari penulisan laporan akhir ini, yaitu bagaimana implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.3. Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan laporan akhir ini lebih terarah dan sesuai dengan masalah yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahap perencanaan hingga pelaporan keuangan.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya bahwa SIPD dalam hal pengelolaan keuangan daerah belum dapat diterapkan secara optimal pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan laporan akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan, maka hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya :

1. Secara Praktis :

- a. Sebagai bahan masukan kepada organisasi (Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan) tentang penerapan SIPD terhadap peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku dan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan langkah perbaikan selanjutnya di masa yang akan datang.
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan pada saat kuliah dan menambah wawasan serta mendapatkan informasi tentang penerapan SIPD pada suatu organisasi.

2. Secara Teoritis :

- a. Sebagai referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya di masa yang akan datang.

1.5. Metode Pengumpulan Data

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di organisasi, diperlukan data yang andal, akurat, dan objektif serta mendukung dalam penyusunan laporan akhir ini. Agar mendapatkan data yang sesuai, penulis memerlukan teknik-teknik dalam mengumpulkan data tersebut. Adapun teknik-teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013) sebagai berikut :

1. Riset Lapangan (*Field Research*)

a. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

b. Kuisisioner (Angket)

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain, seperti wawancara dan kuisioner. Jika wawancara dan kuisioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga objek-objek alam yang lain.

2. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dengan menggunakan metode ini, penulis mendapatkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lain.

Berdasarkan uraian tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah riset lapangan berupa observasi dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan, dalam hal ini Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dan wawancara yaitu dengan melakukan tanya-jawab dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan SIPD, serta studi kepustakaan dimana dokumen yang ada dipelajari untuk memperoleh data dan informasi meliputi dokumen, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan penulisan laporan akhir ini.

1.5.2 Sumber Data

Sanusi (2016) menjelaskan bahwa sumber data dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Terkait dengan data sekunder, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya. Data sekunder selain tersedia di instansi juga tersedia di luar instansi atau di lokasi penelitian.

Berdasarkan sumber data yang telah dijelaskan, data yang digunakan oleh penulis yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut diantaranya hasil wawancara, dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis secara langsung di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, serta data-data lain dari sumber-sumber yang terkait dengan pembahasan laporan laporan akhir ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan laporan akhir ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang bertujuan untuk menghasilkan laporan akhir yang lebih terarah dan fokus pada pembahasan pokok permasalahan yang terjadi di organisasi, sehingga terdapat keterkaitan pada setiap bab yang mana dibagi menjadi sub-sub secara keseluruhan, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulis dalam pemilihan judul, merumuskan masalah yang ada di organisasi, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan pada laporan akhir ini.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang terkait, diantaranya pengertian sistem informasi, sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), jenis SIPD, pengembangan SIPD, peraturan perundang-undangan terkait SIPD, hingga penerapan SIPD berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Bab III Gambaran Umum Organisasi

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan secara singkat struktur organisasi pada organisasi meliputi kepengurusan dan uraian tugasnya, hingga penerapan SIPD di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan meliputi *output* atau laporan dan data yang dihasilkan.

Bab IV Pembahasan

Dalam bab ini penulis akan melakukan analisis dan pembahasan mengenai evaluasi penerapan SIPD pada Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang dikaitkan dengan Permendagri No 77 Tahun 2020 mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pertanggungjawaban keuangan daerah.

Bab V Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan memberikan suatu kesimpulan dan saran dari isi pembahasan yang relevan dari hasil analisis data yang telah dilakukan pada Bab IV.